



Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui *Literacy* Akuntansi Pemerintah, Perpajakan SMKN 1 & SMK Kosgoro 2 Payakumbuh

Armiati¹, Dessi Susanti², Rose Rahmidani³

¹Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang

² Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang

³ Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang

Email: ¹armiati@fe.unp.ac.id, ²dessisusanti@fe.unp.ac.id, ³rose_rahmidani@fe.unp.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan *hardskill* guru-guru Akuntansi SMKN 1 dan SMK Kosgoro 2 Payakumbuh dalam hal: 1) Menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak pribadi dan badan yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran administrasi pajak SMK keahlian Akuntansi, 2) Menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah: Untuk pelatihan dan workshop menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak pribadi dan badan serta untuk pelatihan dan *workshop* menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, pemberian tugas dan tutorial. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah: 1) Dihasilkannya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak pribadi dan badan oleh 85% guru-guru keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 dan SMK Kosgoro 2 Kota Payakumbuh sesuai dengan kasus latihan yang diberikan. 2) Dihasilkannya laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa oleh 85% guru-guru keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 dan SMK Kosgoro 2 Kota Payakumbuh sesuai dengan kasus latihan yang diberikan.

Kata Kunci: Laporan Rekonsiliasi Fiskal, laporan keuangan desa

Abstract

The purpose of *the activities of this community is to increase* the ability of *hardskill* teachers Accounting SMK 1 and SMK Kosgoro 2 Payakumbuh in terms of: 1) Preparing financial statements prepared in accordance with the reconciliation of fiscal taxpayer individuals and entities that constitute the basic competencies for accounting expertise contained in syllabus subjects accounting expertise SMK tax administration, 2) Preparing financial statements for financial accounting villages that are the basis for the competence of accounting expertise contained in the syllabus subjects accounting for Government Institutions Practice. The method used is: For training and workshops to prepare financial statements prepared in accordance with the reconciliation of fiscal taxpayer individuals and entities as well as for training and workshops to prepare financial statements for financial accounting villages use the lecture method, question and answer, discussion, assignments, demonstrations, assignments and tutorials. The results of these service activities are: 1) produced financial statements prepared in accordance with the fiscal reconciliation for personal tax payers and entities by 85% of teachers of SMK Negeri 1 Accounting skills and vocational Kosgoro 2 Payakumbuh State in accordance with the case given exercise. 2) produces financial statements for the financial accounting villages by 85% of teachers of SMK Negeri 1 Accounting skills and vocational Kosgoro 2 Payakumbuh State in accordance with the case given exercise.

Keyword: Reconciliation Report fiscal, financial statements of the village



PENDAHULUAN

Potret kompetensi guru di Sumatera Barat cukup mengecewakan. Dari hasil UKG tahun 2015, rata-rata nilai pedagogik dan nilai profesional guru-guru di Sumatera Barat adalah 54,77 rata-rata UKG nasional 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94 (Kemendikbud, hasil UKG tahun 2015).

Itulah rapor guru pada tahun 2015. Melihat hasil UKG tahun 2015 tersebut masih lebih rendah salah satunya pada evaluasi profesional. Hal tersebut berarti setiap guru perlu memperhatikan aspek penguasaan ruang lingkup materi yang diajarkan.

Salah satu dari 17 sasaran SDG (*Sustainable Development Goals*, 2015-2030) yang dideklarasikan oleh PBB adalah “By 2030 all governments ensure that all learners are taught by qualified, professionally-trained, motivated and well-supported teachers”. Sasaran tersebut kurang lebih menyatakan bahwa proses pendidikan harus didukung oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi, terlatih dan profesional, memiliki motivasi yang tinggi, serta didukung penuh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Professor John Hattie dari *University of Auckland*, faktor dominan penentu prestasi siswa adalah: (1) karakteristik siswa (49%), serta (2) guru (30%), (3) lain-lain (21%). Beberapa penelitian lain juga memperlihatkan besarnya pengaruh kemampuan guru terhadap hasil

pendidikan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut serta pencapaian salah satu sasaran SDG, maka peningkatan kualitas guru di Indonesia menjadi upaya strategis yang harus dilakukan yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya dari bangsa Indonesia.

kemampuan profesional adalah salah satu kunci keberhasilan mendidik. Hasil kemampuan profesional yang masih relatif rendah (54.77%) menunjukkan bahwa masih perlu usaha-usaha keras semua kalangan termasuk lembaga perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan ini, misalnya dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat di sekolah seperti pelatihan dan workshop berbasis peningkatan kemampuan profesional bagi guru dan pelatihan lainnya.

Guru harus menjadi manusia pembelajar terus menerus supaya kompetensinya selalu mutakhir. Tentunya pemerintah dengan dukungan lembaga perguruan tinggi harus memikirkan inisiatif-inisiatif untuk mengatasi masalah ini, seperti pelatihan-pelatihan untuk perkembangan terkini di bidang keilmuannya. Mengingat banyaknya jumlah guru, maka pelatihan secara micro namun bertahap dan berkelanjutan untuk memfasilitasi para guru pembelajar dapat menjadi solusi efektif untuk peningkatan kemampuan guru khususnya kemampuan profesional.

Berdasarkan hal di atas maka peningkatan pendidikan melalui peningkatan kualitas guru yang merupakan salah satu sasaran *suustainable development goals* sudah tidak dapat diabaikan dan merupakan

prasyarat utama, guru adalah pelaksana berbagai program dan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional dalam hal ini guru harus menjadi manusia pembelajar yang harus terus menerus berupaya meningkatkan pengetahuannya.

Berdasarkan Potret kompetensi guru Sumatera Barat di atas penulis dan tim sepakat untuk menindaklanjuti hasil UKG kemendikbud tersebut dengan memfokuskan perhatian pada Kota Payakumbuh, tepatnya SMKN 1 dan SMK Kosgoro 2 payakumbuh. Dari hasil tanya jawab, diskusi, dan *sharing* dengan guru-guru keahlian akuntansi SMKN 1 dan SMK Kosgoro 2 payakumbuh diketahui bahwa kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh guru-guru disana dalam kaitannya dengan hasil UKG kemendikbud 2015 (kompetensi profesional) adalah dalam hal:

- a. Menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak pribadi dan badan yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran administrasi pajak SMK keahlian Akuntansi,
- b. Menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Meningkatkan

kemampuan *hardskill* guru-guru bidang Akuntansi SMKN 1 dan SMK Kosgoro 2 Payakumbuh dalam hal: 1) Menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak pribadi dan badan yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran administrasi pajak SMK keahlian Akuntansi, 2) Menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah.

1. TARGET LUARAN

Target yang ingin dicapai melalui kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

- a. Dihasilkannya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan untuk wajib pajak pribadi dan badan oleh sebagian besar (85%) guru-guru keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 dan SMK Kosgoro 2 Kota Payakumbuh sesuai dengan kasus latihan yang diberikan.
- b. Dihasilkannya laporan rekonsiliasi fiskal oleh sebagian besar (85%) guru-guru keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 dan SMK Kosgoro 2 Kota Payakumbuh sesuai dengan kasus latihan yang diberikan
- c. Dihasilkannya laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah oleh sebagian besar (85%)

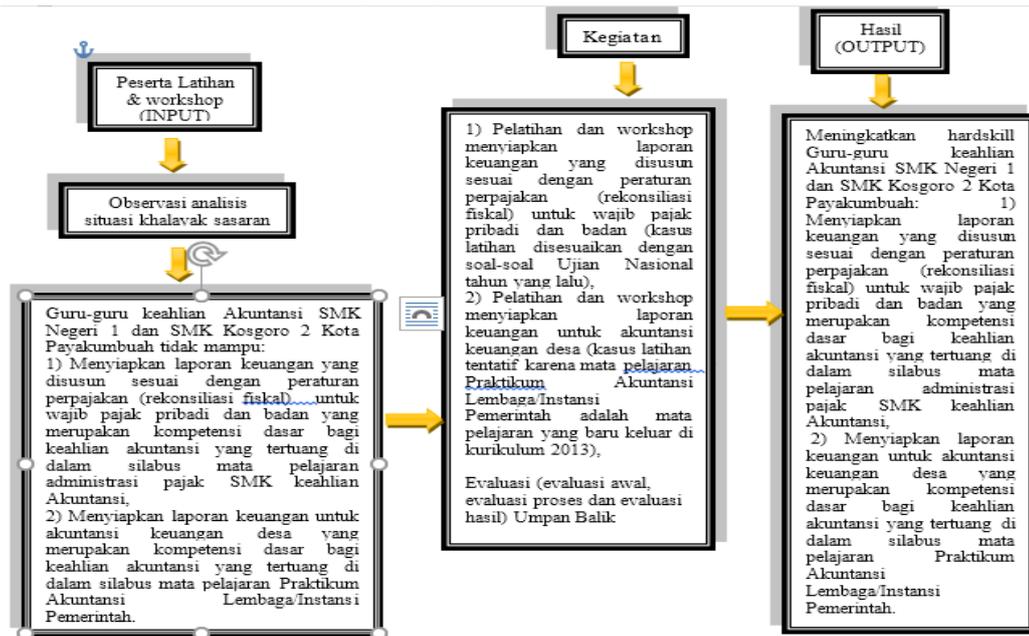
guru-guru keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 dan SMK Kosgoro 2 Kota Payakumbuh sesuai dengan kasus latihan yang diberikan

d. Dihasilkannya catatan akuntansi keuangan desa/kelurahan oleh sebagian besar (85%) guru-guru

keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 dan SMK Kosgoro 2 Kota Payakumbuh sesuai dengan kasus latihan yang diberikan.

METODE PELAKSANAAN

Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

a. Realisasi Pemecahan Masalah

Langkah-langkah untuk merealisasikan kegiatan pelatihan ini adalah:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada persiapan ini adalah:

- a) Pemantapan jadwal yaitu penentuan jadwal konkrit bersama mitra setelah usulan kegiatan disetujui untuk dilaksanakan.
- b) Koordinasi dengan semua pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah sekolah mitra untuk pengurusan izin pelaksanaan kegiatan.
- c) Penetapan peserta: penetapan peserta dilakukan bekerjasama dengan Kepala Sekolah Mitra. Jumlah peserta yang dilibatkan dalam pelatihan maksimal 20 orang.
- d) Menghubungi instruktur dan pembicara dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan.
- e) Memperbanyak modul yang dibuat instruktur dan pembicara untuk dibagikan kepada peserta

2) Pelaksanaan kegiatan

Pada saat kegiatan peserta dibekali dengan satu set ATK (Alat Tulis Kantor) untuk lebih memaksimalkan pelatihan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini guru-guru sekolah mitra akan diberi modul yang berisi tentang materi yang sudah disusun oleh pembicara. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pelatihan dan workshop menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal) untuk wajib pajak pribadi dan badan (kasus latihan disesuaikan dengan soal-soal Ujian Nasional tahun yang lalu)
- 2) Pelatihan dan workshop menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa (kasus latihan tentatif karena mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah adalah mata pelajaran yang baru keluar di kurikulum 2013)
- 3) Tahap akhir kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk masing-masing tahap dengan mengumpulkan dan menyimpulkan data dari masing-masing tahapan kegiatan. Hasil kegiatan pelatihan menunjukkan tingkat keberhasilan dengan indikasi adanya : a) Kesesuaian materi

dengan kebutuhan guru-guru, b) Respon yang positif dari guru-guru, dan sebagian besar (85%) guru telah mampu : a) Menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal) untuk wajib pajak pribadi dan badan yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi seperti yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran administrasi pajak SMK keahlian Akuntansi, b) Menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi seperti yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah.

b. Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pelatihan dan workshop menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal) untuk wajib pajak pribadi dan badan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, pemberian tugas dan tutorial.
- 2) Untuk pelatihan dan *workshop* menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, pemberian tugas dan tutorial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal) untuk wajib pajak pribadi dan badan yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran administrasi pajak SMK keahlian Akuntansi.

Kegiatan pelatihan secara tatap muka dibuka langsung Waka Kurikulum SMKN 1 Payakumbuh yaitu Ibu Darliyenti, M.Pd., pada Jumat tanggal 21 September 2018 jam 08.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari guru-guru Akuntansi SMKN 1 Payakumbuh, SMK 2 Kosgoro dan SMK lain yang merupakan SMK

binaan SMKN 1 Payakumbuh. Bentuk kegiatan adalah ceramah, praktek, simulasi serta penyampaian informasi dan diskusi mengenai materi-materi kegiatan yang terkait dengan membuat menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan untuk wajib pajak pribadi dan badan, membuat laporan rekonsiliasi fiskal, menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa dan melakukan pencatatan akuntansi keuangan desa/kelurahan.

Materi disampaikan oleh Ibu *Charoline* Cheisviyanny, SE, M.Ak, pada Sabtu tanggal 22 September jam 08.00 - 12.00 WIB dengan topik; (1) Pengertian PPh Badan (2) Pembukuan sebagai Dasar Penghitungan Pajak (3) Klasifikasi Penghasilan dan Biaya (4) Penghasilan Badan Usaha (Pasal 4 UU PPh) (5) Penghasilan Kena Pajak Secara Final (6) Penghasilan bukan Obyek Pajak (7) Pengeluaran Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya (8) Pengeluaran Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan Bruto (9) Penghitungan Laba Fiskal (10) Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal (11) Laporan Keuangan Komersial (12) Laporan Keuangan Fiskal (13) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal.

Melalui materi ini, instruktur menjelaskan dan membimbing guru-guru sebagai peserta kegiatan untuk Menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (rekonsiliasi fiskal) untuk wajib pajak pribadi dan badan.

Dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, perusahaan harus menyesuaikan dengan peraturan fiskal saat laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPh yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Hal ini terjadi karena laporan keuangan umumnya dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan/ketentuan perpajakan. Oleh

karena itu dibutuhkan rekonsiliasi fiskal atau biasa disebut dengan koreksi fiskal.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak (Agoes dan Trisnawati, 2007:177)

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak (Setiawan dan Musri, 2006:421).

Dari pengertian *diatas* dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (disusun berdasarkan Sistem Keuangan Akuntansi) dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal.

Rekonsiliasi fiskal merupakan lampiran SPT tahunan PPh badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban.

Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang pengertiannya diurai dibawah ini:

- 1) Koreksi fiskal positif: koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial.
- 2) Koreksi fiskal negatif: koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, antara lain:

- 1) Mengetahui terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan
- 2) Menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak
- 3) Menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif
- 4) Menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan

Terdapat 2 jenis koreksi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu:

1) **Beda Tetap**

- a) Rekonsiliasi fiskal beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, namun menurut ketentuan perpajakan transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya.
- b) Beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

2) **Beda Waktu**

Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Berdasarkan pengertian rekonsiliasi fiskal diatas, dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal/koreksi fiskal memiliki fungsi sebagai penyesuaian transaksi menurut Sistem Akuntansi Keuangan dan menurut ketentuan fiskal/pajak (UU Perpajakan) yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan keuangan komersial dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPh, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal, mengingat terdapat perbedaan besar diantara keduanya baik beda waktu maupun beda tetap. Jadi rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan output berupa hasil koreksi yang berpengaruh besar terhadap besarnya laba kena pajak dan PPh terutang.

- b. Menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan desa yang merupakan kompetensi dasar bagi keahlian akuntansi yang tertuang di dalam silabus mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah.

Materi disampaikan oleh Bapak *Halkadri Fitra*, SE, MM. Ak yang dilaksanakan pada Jumat jam 09.00 WIB tanggal 21 September 2018 melalui metode ceramah, tanya jawab, simulasi sekaligus workshop dengan topik; (1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan (2) Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas (3) Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja (4) Kebijakan Akuntansi Transfer (5) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (5) Kebijakan Akuntansi Piutang (6) Kebijakan Akuntansi Persediaan (7) Kebijakan Akuntansi Investasi. Melalui materi ini, instruktur menjelaskan dan membimbing guru-guru sebagai peserta kegiatan untuk menyiapkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah (8) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan (9) Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan (10) Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan (11) Kebijakan Akuntansi Aset lainnya (12) Kebijakan Akuntansi Kewajiban (13) Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) (14) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi yang ada

saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, karena 1) Desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota (UU 6/2014, Pasal 27), 2) Desa memperoleh pendapatan yang diantaranya bersumber dari APBN dan APBD (UU 6/2016, Pasal 72). Dua alasan ini menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintahan. Mengingat desa memiliki karakteristik yang khas, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan standar akuntansi tersendiri atau tetap mengacu SAP namun dengan sistem akuntansi yang berbeda dari sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah.

Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan tersebut berisi informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan Laporan Kekayaan Milik Desa yang isinya mirip dengan neraca, yaitu berupa informasi tentang aset lancar dan tidak lancar; kewajiban jangka pendek; dan kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dengan kewajiban.

Pelatihan dan workshop perpajakan & akuntansi desa merupakan respon positif kalangan perguruan tinggi dan sekolah atas kebaruan kurikulum SMK Bisnis dan Manajemen yang implementasinya baru dilaksanakan tahun ini. Hal ini juga merupakan upaya berkelanjutan dimana guru harus menjadi manusia pembelajar yang dituntut terus menerus memutakhirkan kemampuan profesionalnya.

Pada tahapan ini guru-guru dibimbing ketika melakukan praktek perpajakan dan akuntansi desa di dalam kelas. Pembimbingan ini bertujuan untuk membantu guru-guru jika mengalami

kesulitan dan kendala selama workshop. Guru-guru sebagai peserta PKM sudah mengumpulkan lembar jawaban sebagai hasil tes kegiatan PKM untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PKM ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

- Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan sukses dan lancar karena mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Kepala Sekolah SMKN 1 dan SMK 2 Kosgoro Payakumbuh sangat mendukung kegiatan ini karena dapat menambah skill guru-guru SMK Bisnis Manajemen Payakumbuh dalam; Menghasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan untuk wajib pajak pribadi dan badan; Menghasilkan laporan rekonsiliasi fiskal; Menghasilkan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah; Menghasilkan catatan akuntansi keuangan desa/kelurahan.
- Peserta kegiatan PKM memiliki motivasi yang tinggi dan sangat antusias mengikuti pelatihan dan *workshop* sehingga komit mengikuti tes perpajakan dan akuntansi desa guna mengetahui keberhasilan kegiatan PKM ini.

Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- Kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan dan *workshop* sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat meningkatkan kemampuan *hardskill* guru pembelajar dalam melaksanakan proses pembelajaran.
- Melalui kegiatan pelatihan dan *workshop* ini, diharapkan guru-guru SMK Bisnis Manajemen Payakumbuh menerapkan ilmu dan *skill* yang diperoleh, sehingga menjadi guru pembelajar yang selalu memberikan kemampuan terbaiknya bagi peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI



Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi Jakarta: Salemba Empat.

Agus Setiawan dan Basri Musri, (2007). *Tax Audit Dan Tax Review*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada

Cahyana, Ade. (2010). *Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menghadapi Sertifikasi*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 16. Nomor 1

Hattie, John. (2008). The Status and Direction of Self Concept Research: The Importance of Importance. Diakses Februari 2018 (Online). Tersedia:
[http://www.education.auckland.ac.nz/uoafms/default/education/staff/Prof.%20John%20Hattie/Documents/John%20hattie%20Papers/self-concept/Status_of_Self-concept-Research_-_Waiheke_\(2003\).pdf](http://www.education.auckland.ac.nz/uoafms/default/education/staff/Prof.%20John%20Hattie/Documents/John%20hattie%20Papers/self-concept/Status_of_Self-concept-Research_-_Waiheke_(2003).pdf)

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 per 29 Maret 2016

Sutamto. (2010). *Tantangan Guru pada Abad Ke-21,(online)* (<http://sutamto.wordpress.com/2010/04/10/tantangan-guru-pada-abad-ke-21/>), diakses 6 Februari 2018.

Usman, M. U. (2008). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya